



## Dinilai Kurang Tegas Atasi Jukir

### Masalah Parkir Setiap Musim Liburan

**JOGJA** - Setiap tahun di musim liburan, masalah tarif parkir yang membubung seperti silus yang selalu berulang. Termasuk dalam musim liburan Lebaran beberapa waktu lalu. Tingginya tarif bisa naik bertipat-lipat kali dari yang sudah ditetapkan sesuai aturan. Hal tersebut hanya menjadi keuhahan yang seperti tak pernah bisa diatasi.

Sekretaris Daerah (Sekda) DII Gatot Saptadi mengatakan, kondisi tersebut sebenarnya bisa diatasi. Jika ada keseriusan dan kemauan dari pemerintah kota/kabupaten untuk melakukan eksekusi di lapangan. Sebab aturan terhadap pelanggaran tersebut sudah sangat jelas.

"Dasarnya SK Wali Kota, pemantau di lapangan Satpol PP. Tinggal mau atau tidak melakukan eksekusi, karena regulasinya *kan* sudah jelas," katanya setelah Evaluasi Angkutan Lebaran Musim 2018, Kamis (12/7).

Dia menilai selama ini masih ada sedikit pembiasaan. Yakni lemahnya langkah-langkah konkret dalam memberi penalti pada pelaku pelanggaran. Menurutnya, mengenai sanksi terhadap para juru parkir (jukir) nakal selama ini dianggap terlalu ringan. "Di dalam aturan, sanksinya memang tipiring (tindak pidana ringan)," katanya.

Gatot mengatakan, hal tersebut jangan sampai terulang kembali di waktu mendatang. Sebab jika terus terulang di kemudian hari, jelas mencoreng nama Jogjakarta terutama di mata wisatawan.

"Jelas dampaknya cukup besar bagi wisatawan, itu termasuk penilaian buruk. Bukan hanya parkir ya, tapi kuliner juga. Kuncinya, di dalam menerapkan itu harus sesuai dengari kesepakatan, aturan, atau regulasi yang berlaku," jelasnya.

Selanjutnya, untuk mengatasi persoalan parkir, Pemprov DIJ berupaya menambah kantong-kantong resmi dengan tujuan untuk meminimalisir jukir liar. Termasuk mengurangi kepadatan lalu lintas di jalanan Kota Jogja. "Meskipun kami sadar kesiapan

lahan sebenarnya terbatas," bebernya.

Dinas Perhubungan DIJ juga berupaya menambah kantong parkir di Kota Jogja agar pada musim liburan, kendaraan yang masuk bisa ditampung di tempat parkir resmi. Hal tersebut termasuk upaya adanya parkir liar yang tarifnya melonjak tinggi saat musim liburan. Salah satu lahan yang dipersiapkan adalah tanah eks UPN di daerah Kotandean dan eks BKKBN.

Kepala Dinas Perhubungan DIJ Sigit Sapto Rahardjo mengatakan, untuk lahan bekas BKKBN pada Agustus mendatang akan dibongkar.

"Sementara untuk eks UPN, kami sedang membuat surat ke Kementerian Pendidikan, karena katanya masih tanah Hankam dan Dinas Pendidikan," katanya kepada wartawan.

Sigit mengatakan, hal tersebut sebagai salah satu upaya pemrov menyediakan lahan parkir. Sebab masalah penindakan jukir nakal menjadi kewenangan pemerintah kota.

Pihaknya ke depan akan melakukan koordinasi dengan pemkab atau pemkot terkait aturan atau kemungkinan perda terkait aturan tarif parkir. Termasuk kemungkinan menetapkan batas atas parkir di hari-hari tertentu. "Masih kami bicarakan," ucapnya.

Sigit mengapresiasi penindakan yang telah dilakukan selama ini. Pelaku-pelaku jukir liar, menurutnya, berada di lokasi berbeda-beda dan bukan di tempat yang sama. "Orangnya juga lain-lain," ungkapnya. (riz/ila/by)

Nilai Berita	<input type="checkbox"/> Amat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Biasa	Tindak Lanjut	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi <input type="checkbox"/> Untuk Diketahui <input type="checkbox"/> Jumpa Pers
--------------	---	---------------	--

Yogyakarta, .....  
 Plt. Kepala  
 Sekretaris

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 30 September 2024  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005